

Ketika Timur Tengah Memanas, Harga Sawit Ikut “Mendidih”

Konflik Israel-Iran pada 2026 kembali memicu gejolak harga energi global. Pertanyaan utama pasar adalah apakah harga naik karena gangguan pasokan nyata atau karena kekhawatiran akan gangguan tersebut. Kenaikan harga minyak juga merambat ke minyak nabati, termasuk sawit, melalui jalur biodiesel dan biaya logistik. Data menunjukkan harga referensi CPO naik dari sekitar US\$918,47 per ton pada Februari 2026 menjadi US\$938,87 per ton pada Maret 2026. Bagi Indonesia, keterkaitan energi dan sawit semakin kuat melalui program biodiesel B40. Lalu, seberapa besar konflik Timur Tengah benar-benar dapat memengaruhi harga sawit global?

*Selengkapnya di halaman 4

Menagih Kepatuhan Uni Eropa: Sawit Indonesia di Persimpangan Hukum Perdagangan Global

Putusan WTO pada Januari 2024 terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa menegaskan bahwa standar keberlanjutan tetap harus diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif dalam perdagangan global. Meski demikian, penurunan pangsa pasar sawit Indonesia di Eropa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa koreksi normatif melalui putusan hukum belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemulihan akses pasar yang nyata. Dalam konteks ini, isu kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi formal, tetapi juga dengan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada arus perdagangan. Menagih kepatuhan berarti memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi benar-benar tercermin dalam keseluruhan arsitektur kebijakan, termasuk dalam implementasi regulasi baru seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR).

*Selengkapnya di halaman 12

Menuju Sawit 2045: Jalan Transformasi dari Komoditas ke Bioindustri Strategis

Kenaikan pungutan ekspor minyak sawit mentah menjadi 12,5 persen melalui PMK 9/2026 menandai penyesuaian kebijakan fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program strategis sektor sawit, terutama biodiesel dan peremajaan sawit rakyat. Secara struktur, kebijakan ini tetap mempertahankan diferensiasi pungutan antara produk mentah dan produk olahan guna mendorong hilirisasi industri. Namun dalam praktik ekonomi, beban pungutan tidak selalu berhenti pada eksportir, melainkan dapat tersebar di sepanjang rantai industri, termasuk berpotensi mempengaruhi harga tandan buah segar yang diterima petani. Karena itu, efektivitas kebijakan ini pada akhirnya sangat bergantung pada tata kelola dana sawit serta sejauh mana manfaatnya benar-benar kembali memperkuat produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.

*Selengkapnya di halaman 2



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Perdagangan global sawit Indonesia tengah memasuki fase baru yang ditandai oleh perubahan konfigurasi pasar dan dinamika hukum perdagangan internasional. Pembukaan akses tarif nol persen ke Amerika Serikat menghadirkan peluang baru bagi ekspor dan penguatan hilirisasi produk sawit. Sementara itu, hubungan dagang dengan Uni Eropa masih diwarnai perdebatan mengenai implementasi standar keberlanjutan. Selamat membaca IPOSS Insights edisi kelima belas!

Siapa Menanggung 12,5%? Membaca Ulang Beban Pungutan Ekspor Sawit



Pemerintah resmi menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) melalui PMK 9/2026 yang berlaku mulai 2 Maret 2026. Aturan ini menggantikan PMK 69/2025 dan menaikkan tarif pungutan pada hampir seluruh produk sawit sekitar 2,5 poin persentase. Untuk CPO, tarif naik dari 10% menjadi 12,5% dari harga referensi. Produk antara naik dari 9,5% menjadi 12%, produk olahan dari 7,5% menjadi 10%, sementara olein kemasan kecil dan biodiesel FAME naik dari 4,75% menjadi 7,25%.

Secara sederhana, aturan ini tidak mengubah struktur dasar kebijakan. Produk yang masih berada di hulu tetap dikenai pungutan lebih tinggi dibanding produk yang sudah diolah. Tujuannya tetap sama seperti sebelumnya: mendorong industri sawit Indonesia agar lebih banyak mengekspor produk olahan, bukan hanya bahan mentah. Karena itu, kebijakan baru ini lebih tepat dipahami sebagai upaya menambah penerimaan dana sawit, bukan mengubah arah kebijakan industri.

Alasan utama kenaikan pungutan ini berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan program biodiesel nasional. Sejak 2015, Indonesia menggunakan dana pungutan ekspor sawit untuk mendukung program biodiesel melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana tersebut terutama digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel berbasis sawit dan solar berbasis minyak fosil. Selain itu, dana sawit juga digunakan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), riset, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan.

Masalahnya, kebutuhan dana untuk program biodiesel terus meningkat. Program campuran biodiesel B40 mulai berjalan

pada 2025 dengan kebutuhan sekitar 15,6 juta kiloliter. Bahkan, pemerintah juga merencanakan peningkatan ke B50 pada 2026. Dengan skala program yang semakin besar, tekanan terhadap dana sawit juga ikut meningkat. Pada 2024, penerimaan pungutan ekspor sawit sekitar Rp25,77 triliun, sementara pembayaran insentif biodiesel mencapai sekitar Rp28,81 triliun untuk volume lebih dari 11 juta kiloliter.

Lalu muncul pertanyaan penting: siapa sebenarnya yang menanggung kenaikan pungutan ini?

Secara administratif, pungutan dibayar oleh perusahaan eksportir. **Namun dalam praktik ekonomi, beban tersebut jarang berhenti di satu pihak saja.** Biaya tambahan biasanya akan tersebar di sepanjang rantai industri, tergantung pada kondisi pasar.

Dalam banyak kasus, sebagian beban dapat diteruskan ke harga domestik. Jika itu terjadi, dampaknya bisa terasa hingga ke tingkat pabrik kelapa sawit dan bahkan ke harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Petani kecil menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka tidak memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana dana pungutan digunakan. Jika dana benar-benar mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat peremajaan sawit rakyat, dan memperkuat industri secara keseluruhan, maka pungutan ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi sektor sawit Indonesia. Namun tanpa tata kelola yang kuat dan perlindungan terhadap petani kecil, kenaikan pungutan berisiko justru menambah tekanan pada kelompok yang paling lemah dalam rantai industri sawit. (JH)

Biodiesel Meningkat, Bagaimana Dampaknya pada Minyak Goreng?



Selama satu dekade terakhir, produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia relatif stagnan. Produksi nasional berkisar di angka 45–47 juta ton per tahun. Pada 2021 produksi tercatat sekitar 45,12 juta ton dan naik tipis menjadi 46,82 juta ton pada 2022. Artinya, meskipun Indonesia masih menjadi produsen sawit terbesar di dunia, pertumbuhan produksi tidak lagi secepat sebelumnya.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap sawit terus meningkat. Sawit tidak hanya digunakan untuk minyak goreng dan industri pangan, tetapi juga sebagai bahan baku biodiesel. Konsumsi domestik untuk pangan saat ini sekitar 20–21 juta ton per tahun, sementara kebutuhan untuk biodiesel mencapai sekitar 8,8 juta ton pada 2022. Dengan kata lain, sawit kini memiliki dua fungsi utama: sebagai bahan pangan dan sebagai sumber energi.

Pemerintah Indonesia terus memperluas program biodiesel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi. Setelah penerapan B30 pada 2020 dan B35 pada 2023, Indonesia mulai menerapkan mandat B40 pada 2025. Kebijakan ini berarti bahan bakar solar dicampur dengan 40% biodiesel berbasis sawit. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,6 juta kiloliter biodiesel pada 2025, yang setara dengan sekitar 13–14 juta ton CPO. Bahkan, pemerintah menargetkan peningkatan campuran hingga B50 pada 2026, yang diperkirakan membutuhkan hampir 19 juta kiloliter biodiesel.

Peningkatan mandat biodiesel tentu berdampak pada distribusi penggunaan sawit. Jika sebelumnya sebagian besar sawit digunakan untuk pangan dan ekspor, kini porsi yang dialokasikan untuk energi semakin besar. Analogi sederhananya seperti membagi satu “kue” yang ukurannya tidak banyak berubah, tetapi jumlah orang yang ingin mengambil bagian semakin banyak. Ketika kebutuhan energi meningkat, otomatis porsi untuk sektor lain bisa berkurang. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa

peningkatan biodiesel dapat mempengaruhi pasokan minyak goreng domestik. Jika lebih banyak CPO dialihkan ke energi, ketersediaan bahan baku untuk minyak goreng bisa berkurang, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga.

Pengalaman pada 2021–2022 menunjukkan bagaimana dinamika ini bisa terjadi. Saat itu, harga minyak goreng sempat melonjak tajam dari sekitar Rp12.300 per liter menjadi hampir Rp18.000 per liter. Lonjakan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh biodiesel, tetapi juga oleh faktor lain seperti kenaikan harga CPO global, gangguan rantai pasok, serta kebijakan ekspor.

Namun demikian, hubungan antara biodiesel dan harga minyak goreng tidak selalu bersifat langsung. Analisis berbagai studi pasar minyak nabati, termasuk laporan CIPS (Center for Indonesian Policy Studies) dan USDA (United States Department of Agriculture), menunjukkan bahwa hubungan antara biodiesel dan harga minyak goreng tidak selalu langsung karena dipengaruhi faktor substitusi minyak nabati lain serta kebijakan domestik seperti DMO dan HET.

Dalam jangka panjang, kunci utama terletak pada peningkatan produktivitas sawit. Program peremajaan kebun rakyat (replanting), penggunaan bibit unggul, serta peningkatan efisiensi pengolahan dapat meningkatkan produksi tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pengembangan sumber bahan baku energi lain agar ketergantungan biodiesel tidak sepenuhnya pada CPO.

Dengan strategi yang tepat, program biodiesel tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan stabilitas harga pangan. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, kepentingan ekspor, dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. (JH)

Ketika Timur Tengah Memanas, Harga Sawit Ikut “Mendidih”



Konflik di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh gejolak harga energi global. Hal ini bukan kebetulan. Sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini memegang peranan penting dalam pasokan energi dunia. Kini, ketika konflik antara Israel dan Iran kembali memanas pada 2026, pasar minyak kembali menghadapi pertanyaan yang sama: apakah harga naik karena pasokan benar-benar terganggu, atau karena pasar takut pasokan akan terganggu?

Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi pasar minyak, tetapi juga bagi komoditas lain yang semakin terhubung dengan pasar energi, termasuk minyak sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara harga minyak mentah dan minyak nabati semakin kuat karena berkembangnya industri biodiesel. Ketika harga minyak fosil naik, biodiesel menjadi lebih kompetitif, sehingga permintaan bahan bakunya—seperti minyak sawit—cenderung meningkat.

Pergerakan ini mulai terlihat pada data harga sawit tahun ini. Harga referensi minyak sawit mentah (CPO) pada Februari 2026 tercatat sekitar US\$918,47 per ton, sementara pada Maret 2026 naik menjadi sekitar US\$938,87 per ton atau meningkat sekitar 2,22 persen dalam satu bulan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

Kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan lonjakan harga energi global. Dalam situasi konflik, pasar komoditas sering kali merespons bukan hanya pada gangguan pasokan yang nyata, tetapi juga pada ekspektasi risiko. Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak—misalnya di jalur pelayaran utama seperti Teluk Persia—dapat memicu kenaikan harga energi yang kemudian merambat ke komoditas lain.

Selain jalur biodiesel, kenaikan harga energi juga memengaruhi biaya logistik. Harga diesel yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya transportasi komoditas, mulai dari pengangkutan tandan buah segar hingga pengiriman minyak sawit ke pasar ekspor. Dalam rantai pasok global, kenaikan biaya energi ini sering kali tercermin pada harga komoditas pertanian dan pangan.

Di pasar internasional, ketegangan geopolitik juga membuat importir minyak nabati lebih berhati-hati. Beberapa pembeli bahkan mempercepat pengamanan pasokan karena khawatir terhadap keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya angkut selama konflik berlangsung.

Bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, perkembangan ini memiliki implikasi penting. Program biodiesel domestik seperti B40 membuat keterkaitan antara pasar energi dan pasar sawit semakin erat. Ketika harga minyak dunia melonjak, biodiesel menjadi lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil sehingga permintaan bahan baku seperti minyak sawit berpotensi meningkat. **Jika harga minyak terus naik akibat konflik geopolitik, pertanyaan lain yang muncul kemudian adalah: apakah tekanan untuk meningkatkan campuran biodiesel, bahkan menuju B50, akan kembali menguat?**

Dengan demikian, konflik di Timur Tengah tidak hanya memengaruhi pasar minyak bumi. Dalam sistem komoditas global yang semakin terhubung, gejolak energi juga dapat menjalar ke pasar minyak nabati. Bagi pasar sawit dunia, setiap eskalasi geopolitik di kawasan energi utama sering kali berarti meningkatnya volatilitas harga—bahkan sebelum gangguan pasokan benar-benar terjadi. (JH)

Tarif Nol Persen ke Amerika Serikat: Peluang Ekspor di Tengah Hambatan Non-Tarif

Kekhawatiran sempat muncul ketika wacana tarif resiprokal Amerika Serikat berpotensi melonjak hingga 32 persen bagi sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dalam struktur perdagangan komoditas global yang sangat sensitif terhadap proteksionisme, lonjakan tarif sebesar itu bukan sekadar penyesuaian fiskal, tetapi risiko struktural yang dapat langsung menggerus daya saing harga ekspor. Bagi Indonesia, yang menempatkan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekspor nonmigas, skenario tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan struktur ekspor nasional.

Penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026 menjadi titik balik penting. Perjanjian ini menetapkan pengecualian tarif hingga 0 persen bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit dan turunannya. Kepastian struktur tarif yang lebih moderat tidak hanya menghindarkan risiko eskalasi proteksionisme, tetapi juga menjaga keberlanjutan akses Indonesia pada salah satu pasar utama dalam struktur ekspor sawit global.

Dalam konfigurasi ekspor 2025, Amerika Serikat merupakan bagian dari empat pasar terbesar ekspor sawit Indonesia bersama Cina, India, dan Pakistan. Keempat negara tersebut secara kolektif menyerap sekitar 44,1 persen ekspor sawit Indonesia. Selama periode 2020–2025, ekspor sawit Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan tren yang relatif konsisten. Volume ekspor meningkat dari sekitar 1,49 juta ton pada 2020 menjadi 2,28 juta ton pada 2025 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9 persen per tahun. Sementara itu, nilai ekspor meningkat lebih cepat, dari sekitar USD 1,1 miliar menjadi USD 2,73 miliar dengan laju pertumbuhan sekitar 20 persen per tahun. Perbedaan antara pertumbuhan volume dan nilai ini mencerminkan pergeseran struktur ekspor menuju produk bernilai tambah yang lebih tinggi.

Transformasi tersebut terlihat dari meningkatnya kontribusi produk refined dan oleokimia dalam ekspor ke pasar Amerika Serikat. Produk seperti refined palm oil, refined palm olein, RBD palm kernel oil, hingga turunan oleokimia seperti glycerol, palmitic acid, dan stearic acid menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, pasar Amerika Serikat tidak lagi hanya menyerap bahan baku primer, tetapi juga menjadi tujuan penting bagi ekspansi hilirisasi industri sawit Indonesia.

Namun demikian, penghapusan tarif bukan berarti hambatan perdagangan sepenuhnya hilang. Dalam praktik perdagangan global saat ini, hambatan non-tarif justru semakin sering menjadi instrumen pembatas perdagangan

baru. Standar keberlanjutan, tuntutan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta berbagai persyaratan sertifikasi lingkungan kerap menjadi mekanisme yang menentukan akses pasar di negara maju.

Dalam banyak kasus, instrumen-instrumen tersebut juga berfungsi sebagai bentuk hambatan perdagangan yang bersifat tidak langsung atau “terselubung”. Standar keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga sering menjadi bagian dari strategi kebijakan industri negara maju untuk melindungi sektor domestik maupun mengarahkan struktur rantai pasok global. Dalam konteks komoditas biofuel dan oleokimia, misalnya, berbagai standar keberlanjutan dapat memengaruhi komposisi bahan baku yang digunakan oleh industri energi dan kimia di negara maju, sehingga secara tidak langsung membatasi penetrasi komoditas tertentu di pasar mereka.

Selain melalui standar keberlanjutan, dinamika geopolitik perdagangan juga mulai memengaruhi struktur perjanjian dagang modern. Beberapa klausul dalam ART yang berkaitan dengan pembatasan terhadap “negara ketiga” bahkan memicu perhatian dari mitra dagang lain seperti Tiongkok. Situasi ini menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak lagi semata berkaitan dengan tarif, tetapi juga dengan konfigurasi strategis rantai pasok global di tengah rivalitas ekonomi antar kekuatan besar.

Produk sawit Indonesia masih menghadapi tekanan melalui standar keberlanjutan yang semakin ketat maupun kampanye negatif yang memengaruhi persepsi konsumen dan pelaku industri di pasar tujuan.

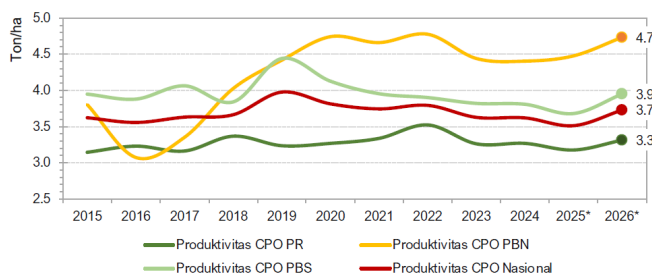
Di sinilah tantangan strategis bagi Indonesia muncul. Akses tarif yang lebih kompetitif harus diimbangi dengan kemampuan menjaga kredibilitas standar keberlanjutan sekaligus memperkuat struktur industri hilir domestik. Tanpa penguatan hilirisasi dan strategi diplomasi standar yang lebih aktif, peluang dari tarif nol persen berisiko tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan ekspor yang berkelanjutan.

Dengan demikian, ART membuka ruang strategis bagi ekspor sawit Indonesia, tetapi bukan tanpa tantangan. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat hilirisasi industri sekaligus memperluas diplomasi pasar dan standar keberlanjutan. Dalam perdagangan global yang semakin dipengaruhi oleh regulasi non-tarif dan rivalitas geopolitik, kemampuan menjaga akses pasar bagi produk hilir bernilai tambah akan menjadi kunci utama daya saing sawit Indonesia ke depan. (AF)

Revolusi Digital Sawit: Apakah Teknologi Bisa Menjadi *Game Changer* Produktivitas?

Di balik kontribusi besar industri kelapa sawit terhadap ekspor dan perekonomian nasional, sektor ini masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan produktivitas antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang masih cukup lebar. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inovasi digital mulai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun. Pertanyaannya, sejauh mana teknologi digital benar-benar dapat menjadi *game changer* dalam meningkatkan produktivitas industri sawit Indonesia?

Kesenjangan produktivitas antar tipe pengelolaan perkebunan merupakan isu yang cukup menonjol dalam industri sawit. Perbedaan akses terhadap teknologi, kualitas bibit, praktik agronomi, serta kapasitas manajerial menyebabkan produktivitas kebun perusahaan dan kebun rakyat tidak berada pada tingkat yang sama.



Grafik 1. Produktivitas CPO Berdasarkan Kepemilikan Perkebunan (IPOSS, 2025)

Data menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS) secara konsisten berada di atas perkebunan rakyat (PR). Pada proyeksi tahun 2026, produktivitas PBN diperkirakan mencapai sekitar 4,7 ton per hektare, diikuti PBS sekitar 3,9 ton per hektare, sementara PR berada pada kisaran 3,3 ton per hektare. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sawit tidak hanya bergantung pada ekspansi lahan, tetapi juga peningkatan efisiensi pengelolaan kebun.

Perkembangan teknologi digital di sektor perkebunan juga memanfaatkan sensor tanah berbasis konektivitas internet yang memantau kondisi tanah secara real-time. Sensor ini mengukur parameter seperti kelembaban dan suhu

tanah, lalu mengirimkan data ke platform analitik berbasis cloud untuk mendukung keputusan pengelolaan air dan pemupukan (Evelt et al., 2020). Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kebutuhan inspeksi lapangan yang memerlukan tenaga kerja tambahan. Contoh perangkat yang tersedia di pasar antara lain CropX Smart Soil Sensor atau Arable Mark.

Perkembangan lain terlihat pada penggunaan drone pertanian untuk pemetaan tanaman dan aplikasi input secara presisi. Drone dilengkapi sensor dan navigasi otomatis untuk penyemprotan pupuk atau pestisida serta pengambilan citra tanaman pada tingkat blok kebun. Data citra tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi variasi kesehatan tanaman dan menentukan area yang memerlukan intervensi (Hunt & Daughtry, 2021). Dalam praktik operasional, teknologi ini memungkinkan kegiatan pemetaan atau penyemprotan dilakukan lebih cepat dibandingkan metode manual yang memerlukan banyak pekerja lapangan. Contoh teknologi ini antara lain DJI Agras T40 atau XAG P100.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan. Pemanfaatan sensor lapangan, drone pertanian, dan platform analitik berbasis cloud memungkinkan pengelolaan kebun dilakukan lebih presisi, mulai dari pemantauan kondisi tanah hingga penentuan intervensi agronomis. Dengan demikian, digitalisasi berpotensi mendorong peningkatan produktivitas sawit, sehingga upaya peningkatan produksi tidak perlu bergantung pada ekspansi lahan.

Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dirasakan oleh seluruh pelaku industri. Sebagian besar kebun sawit dikelola oleh petani rakyat dengan keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan. Tanpa pendekatan yang inklusif, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas. Karena itu, diperlukan model adopsi yang memungkinkan teknologi digunakan secara kolektif, misalnya melalui layanan teknologi bersama atau integrasi dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi industri sawit, tetapi juga berpotensi mempersempit kesenjangan produktivitas antara perkebunan besar dan kebun rakyat. (FGK)



Keniscayaan B50 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global



Perang antara AS-Israel vs Iran di wilayah Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Perang tersebut meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dunia karena Iran berada di kawasan strategis yang mengendalikan jalur perdagangan energi penting: Selat Hormuz. Sekitar seperlima perdagangan minyak global setiap hari melewati jalur ini. Ketika eskalasi konflik meningkat, kekhawatiran terhadap gangguan pasokan segera memicu volatilitas harga energi dan memperkuat sinyal potensi krisis energi global.

Dalam situasi seperti ini, banyak negara cenderung memperkuat ketahanan energinya dengan memperluas pemanfaatan sumber energi alternatif. Negara-negara seperti Brazil, Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga sejumlah negara di Asia berpotensi meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati melalui mandat pencampuran, perluasan produksi, maupun perdagangan biofuel. Jika kebijakan ini menguat secara bersamaan, permintaan minyak nabati global akan meningkat dan cepat menjalar di antara komoditas utama—minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan minyak sawit—sehingga pasar minyak sawit ikut terdorong oleh perubahan struktur permintaan energi dunia tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika energi global tersebut memberi perspektif baru terhadap kebijakan biodiesel nasional. Ketika harga minyak dunia naik dan biaya impor diesel meningkat, substitusi sebagian konsumsi diesel dengan biodiesel berbasis minyak sawit menjadi semakin relevan untuk menjaga stabilitas neraca energi domestik. Dalam konteks ini, dorongan percepatan mandatori biodiesel menuju B50 dapat dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Pada 2026, program biodiesel masih mengacu pada mandat B40 yang menyerap sekitar 13,6 juta ton CPO atau hampir

26 persen dari total produksi minyak sawit nasional untuk menghasilkan sekitar 15,6 juta kiloliter FAME. Jika mandatori meningkat menjadi B50, kebutuhan CPO dapat naik menjadi 17,4 juta ton atau sekitar 34 persen dari total produksi minyak sawit nasional, sehingga konsumsi domestik naik dari 49 persen menjadi sekitar 57 persen produksi. Dengan asumsi produksi stagnan, maka ekspor berpotensi turun sekitar 16–17 persen.

Penurunan ekspor ini berpotensi mengurangi penerimaan devisa serta pendapatan fiskal dari pajak ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Namun di sisi lain, berkurangnya pasokan sawit di pasar global dapat menciptakan ketidakseimbangan baru pada pasar minyak nabati dan mendorong penyesuaian harga pada seluruh kelompok minyak nabati, termasuk minyak kedelai dan minyak *rapeseed*.

Dalam kondisi krisis energi global, kenaikan harga minyak bumi umumnya lebih tajam dibandingkan minyak nabati. Hal ini berpotensi mempersempit selisih harga antara bahan bakar fosil dan biodiesel, sehingga kebutuhan insentif untuk menjaga daya saing biodiesel dapat menjadi lebih rendah. Dengan kebijakan menaikkan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% beserta penyesuaian tarif produk turunannya pada awal Maret ini, penerimaan dana sawit melalui BPDP diharapkan tetap mampu mendukung pembiayaan program biodiesel.

Namun berbagai kemungkinan skenario akibat ketidakpastian geopolitik global tetap menuntut kewaspadaan kebijakan. Indonesia perlu terus memantau dinamika pasar energi dan minyak nabati sekaligus menjaga fleksibilitas kebijakan. Dalam periode yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar global akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas energi sekaligus keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. (RFY)

Sawit 2030 dan Struktur Produksi yang Menua: Alarm untuk Momentum Perbaikan



Dalam beberapa diskursus sawit belakangan ini, muncul kekhawatiran mengenai kondisi industri sawit Indonesia menjelang 2030. Kekhawatiran tersebut umumnya dikaitkan dengan praktik pengelolaan lahan perkebunan yang dinilai berpotensi menimbulkan degradasi tanah dalam jangka panjang. Sejumlah kalangan bahkan memandang persoalan ini sebagai sinyal risiko bagi keberlanjutan produksi sawit nasional.

Walaupun asumsi tersebut masih patut diperdebatkan—mengingat sawit di Indonesia telah dibudidayakan secara komersial selama lebih dari satu abad dan melewati setidaknya empat generasi penanaman sejak 1911—alarm tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Industri sawit Indonesia memang telah melalui berbagai fase adaptasi agronomis dan teknologi, namun dinamika struktur produksinya tetap perlu dibaca secara hati-hati.

Salah satu indikator yang mulai mendapat perhatian adalah meningkatnya proporsi tanaman tua di berbagai wilayah perkebunan, sementara laju peremajaan kebun berjalan relatif lambat. Ketidakseimbangan antara umur tanaman dan kecepatan peremajaan ini dalam jangka panjang dapat mempengaruhi produktivitas agregat industri sawit Indonesia. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi industri sawit tidak semata berkaitan dengan isu degradasi lahan, tetapi juga menyangkut struktur produksi yang semakin menua.

Dalam struktur produksi sawit, keseimbangan antara umur tanaman (aging rate) dan laju peremajaan kebun (replant rate) menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan

produktivitas. Ketika laju peremajaan berjalan lebih lambat daripada proses penuaan tanaman, struktur umur kebun secara bertahap akan didominasi oleh tanaman tua yang secara alami memiliki produktivitas lebih rendah.

Kondisi tersebut tercermin pada produktivitas nasional saat ini. Pada 2025, produktivitas rata-rata sawit Indonesia diperkirakan berada di kisaran 3,7-ton CPO per hektare, jauh di bawah potensi varietas unggul yang dapat mencapai 6–8 ton per hektare. Kesenjangan produktivitas ini juga terlihat pada perkebunan rakyat yang rata-rata hanya mencapai sekitar 3,3-ton CPO per hektare. Hal ini menjadi semakin penting mengingat perkebunan rakyat mencakup sekitar 42 persen dari total luas sawit nasional, namun kontribusinya terhadap produksi baru sekitar 35 persen

Gambaran kesenjangan produktivitas tersebut juga tercermin dalam simulasi produksi perkebunan rakyat yang disajikan dalam Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 (IPOSS, 2025). Simulasi tersebut menunjukkan bahwa apabila laju peremajaan kebun rakyat tetap berjalan lambat—sekitar 30 ribu hingga 50 ribu hektare per tahun—maka peningkatan luas tanaman tua yang tidak diremajakan akan lebih cepat dibandingkan dengan luas kebun yang berhasil diperbarui.

Dalam skenario tersebut, produktivitas kebun rakyat secara bertahap akan menurun seiring meningkatnya proporsi tanaman tua yang tidak lagi berada pada fase produktif optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat kebun, tetapi juga tercermin pada proyeksi produksi jangka panjang. Simulasi menunjukkan bahwa tanpa percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), total produksi CPO dari perkebunan rakyat berpotensi menurun hingga mendekati sekitar 10 juta ton pada 2060.

Temuan ini menunjukkan bahwa lambatnya laju peremajaan bukan sekadar persoalan teknis di tingkat kebun, melainkan memiliki implikasi struktural terhadap produksi nasional. Mengingat besarnya peran perkebunan rakyat dalam struktur industri sawit Indonesia, stagnasi produktivitas pada segmen ini akan secara langsung mempengaruhi kemampuan industri sawit nasional menjaga pertumbuhan produksi di masa depan. Dalam konteks tersebut, alarm mengenai kondisi sawit menuju 2030 dapat dibaca sebagai sinyal perlunya koreksi struktural pada sistem produksi sawit nasional. Percepatan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu berjalan seiring dengan penguatan praktik pengelolaan kebun yang berkelanjutan, sehingga perbaikan struktur produksi dapat berlangsung bersamaan dengan upaya menjaga kualitas lahan dan keberlanjutan industri sawit Indonesia. (DS)

Ekspansi Sawit di Papua: Menjembatani Transisi Energi dan Keadilan Sosial

Papua sering diposisikan sebagai wilayah konservasi dalam perdebatan pembangunan, tetapi pada saat yang sama menghadapi tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih berada di kisaran >20% dalam beberapa tahun terakhir, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di bawah 10%. Pengembangan ekonomi yang inklusif perlu dirancang agar tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Perhatian terhadap pengembangan sawit di Papua tidak terlepas dari posisi strategis komoditas ini dalam ekonomi nasional. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi sekitar 46–50 juta ton CPO per tahun atau 55–60% produksi global. Sebagian produksi tersebut menopang program biodiesel nasional yang telah mencapai B40 dan diperkirakan menyerap sekitar 15,6 juta ton CPO pada 2026, sehingga berkontribusi pada penguatan ketahanan energi. Dalam kerangka transisi energi, bioenergi berbasis sawit diposisikan sebagai salah satu sumber energi terbarukan penting dalam jangka menengah.

Papua menjadi perhatian karena masih memiliki cadangan lahan yang relatif luas dengan tata ruang yang masih dapat diarahkan melalui perencanaan yang lebih sistematis. Saat ini porsi perkebunan kelapa sawit di Papua diperkirakan baru sekitar 1,5% dari total nasional, jauh lebih kecil dibandingkan Sumatra dan Kalimantan sebagai pusat produksi utama. Kondisi ini membuka peluang bagi Papua untuk memulai pengembangan dengan pendekatan *late development advantage*, yaitu belajar dari pengalaman pembangunan sebelumnya untuk memperbaiki praktik tata kelola sejak tahap awal.

Pendekatan ini perlu dimaknai sebagai kesempatan melakukan koreksi desain kebijakan sejak awal pembangunan. Pengalaman pengembangan sawit di Sumatra dan Kalimantan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada komoditasnya, melainkan pada tata kelola, mulai dari tumpang tindih izin, ketidakjelasan batas kawasan, hingga lemahnya integrasi perencanaan pusat dan daerah. Karena itu, pengembangan di Papua seharusnya dimulai dengan konsolidasi data spasial, sinkronisasi RTRW

dengan kebijakan kehutanan, penataan perizinan berbasis satu peta, serta penguatan kemitraan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan sawit di Papua dapat diarahkan sebagai instrumen pembangunan wilayah yang lebih terkendali dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi daerah, investasi perkebunan skala besar umumnya diikuti pembangunan jalan produksi, fasilitas logistik, dan pembukaan akses ke wilayah terpencil. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kehadiran perkebunan dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, meningkatkan perputaran uang lokal, serta menciptakan lapangan kerja formal maupun informal. Dengan desain kebijakan tepat misalnya melalui skema kemitraan plasma, pelibatan BUMD, atau koperasi lokal nilai tambah sawit dapat lebih banyak dinikmati masyarakat setempat. Namun, agar manfaat ekonomi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif, penguatan tata kelola sosial menjadi aspek yang tidak terpisahkan.

Penguatan tata kelola tersebut juga semakin relevan dalam konteks pasar global yang menuntut praktik produksi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai standar keberlanjutan dan kebijakan bebas deforestasi di pasar internasional mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam industri sawit. Sertifikasi keberlanjutan, baik melalui skema nasional maupun global, tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia.

Pada akhirnya, pengembangan sawit di Papua bukan sekadar ekspansi komoditas, tetapi bagian dari desain pembangunan wilayah. Dengan tata kelola yang tepat, ekspansi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus ruang pembuktian bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan perencanaan spasial berbasis data, konsolidasi kebijakan satu peta, kemitraan ekonomi lokal yang inklusif, transparansi perizinan, serta integrasi kebijakan energi dan pembangunan daerah. Jika dirancang sejak awal, Papua berpeluang menjadi contoh bagaimana komoditas strategis dapat dikelola untuk mendukung transisi energi sekaligus memenuhi prinsip keberlanjutan. (MA)

Ketika Sawit Terlalu Bergantung: Risiko Konsentrasi Pasar India dan Tiongkok

Industri sawit Indonesia dikenal sebagai salah satu penopang utama devisa nasional. Namun di balik besarnya volume ekspor tersebut, struktur pasar sawit Indonesia menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada beberapa negara tujuan utama, terutama India dan Tiongkok.

Pada 2025, ekspor sawit Indonesia ke dua negara tersebut mencapai sekitar 30% dari total nilai ekspor minyak sawit nasional, dengan volume sekitar 10,4 juta ton dan nilai mencapai USD 11,2 miliar. Artinya, hampir sepertiga penerimaan devisa sawit Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perdagangan di kedua negara tersebut.

Persoalannya bukan sekadar besarnya pangsa pasar, melainkan perbedaan jenis produk yang diserap oleh masing-masing negara. Dalam enam tahun terakhir (2020–2025), ekspor ke India lebih banyak didominasi produk mentah seperti CPO dan CPKO dengan akumulasi sekitar 17,7 juta ton. Sebaliknya, Tiongkok hampir seluruhnya menyerap produk turunan minyak sawit dengan total sekitar 39 juta ton.

Perbedaan komposisi ini menunjukkan bahwa kedua pasar memainkan fungsi yang berbeda dalam perdagangan sawit Indonesia. India cenderung berperan sebagai pasar komoditas yang menentukan dinamika volume ekspor minyak sawit mentah. Sementara itu, Tiongkok lebih mencerminkan pasar industrialisasi yang mendorong permintaan terhadap produk turunan serta aktivitas pengolahan dalam rantai industri sawit.

Jika dilihat dari sisi nilai perdagangan, perbedaan karakter pasar ini menjadi semakin jelas. Hampir seluruh ekspor sawit ke Tiongkok berupa produk turunan dengan proporsi mendekati 100% sepanjang periode 2020–2025. Pola ini membuat pasar Tiongkok relatif stabil sebagai tujuan produk hilir dan berperan penting dalam menjaga nilai ekspor sawit Indonesia. Sebaliknya, pasar India menunjukkan komposisi yang lebih fleksibel. Proporsi produk mentah dapat berubah cukup signifikan dari tahun ke tahun, mengikuti dinamika harga minyak nabati global dan kebijakan tarif impor.

Perbedaan fungsi tersebut membuat respons kebijakan kedua negara berdampak berbeda terhadap Indonesia. Ketika India memangkas tarif *crude edible oil* dari 27,5% menjadi 16,5%, selisih harga antara CPO dan produk olahan melebar sehingga mendorong peningkatan ekspor minyak sawit mentah. Sebaliknya di Tiongkok, tekanan lebih banyak muncul melalui regulasi non-tarif seperti standar pelabelan,

ketertelusuran, dan keberlanjutan yang mempengaruhi industri pengolahan sawit.

Di saat yang sama, persaingan antar minyak nabati di pasar global juga semakin kuat. Sejak 2023, spread harga minyak sawit terhadap minyak kedelai dan minyak bunga matahari cenderung menyempit sehingga mengurangi keunggulan harga yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama sawit. Ketika selisih harga mengecil, industri makanan dan oleokimia memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan formulasi bahan baku dengan minyak nabati lain yang memiliki karakteristik penggunaan serupa.

Perubahan ini mulai tercermin pada pola konsumsi di beberapa pasar utama. Di Tiongkok, pangsa konsumsi minyak sawit terhadap total minyak nabati turun dari sekitar 15% pada 2021 menjadi sekitar 11% pada 2025. Di India, konsumsi sawit masih menyumbang sekitar sepertiga dari total minyak nabati, meskipun pertumbuhannya cenderung stagnan.

Dalam kondisi seperti ini, memahami karakter masing-masing pasar menjadi semakin penting. Permintaan di India sangat dipengaruhi oleh dinamika harga relatif antar minyak nabati serta kebijakan tarif impor, sehingga perubahan harga atau kebijakan dapat dengan cepat mempengaruhi volume perdagangan. Sebaliknya, pasar Tiongkok lebih dipengaruhi oleh perkembangan industri makanan, oleokimia, serta standar regulasi yang terus berkembang.

Struktur perdagangan ini menunjukkan bahwa India cenderung berperan dalam menentukan dinamika volume ekspor minyak sawit mentah, sementara Tiongkok menjadi pasar utama bagi produk turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Perbedaan karakter tersebut menuntut strategi ekspor yang tidak seragam. Karena itu, Indonesia perlu mengelola kedua pasar tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai perdagangan sawit.

Dalam konteks tersebut, tantangan utama ekspor sawit Indonesia bukan sekadar memperluas pasar baru, melainkan menyesuaikan komposisi produk dengan kebutuhan pasar utama. India kemungkinan akan tetap mempengaruhi dinamika volume perdagangan, sementara Tiongkok memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nilai ekspor dan perkembangan industri hilir. Mengelola keseimbangan antara keduanya menjadi kunci agar sawit tidak hanya bertahan sebagai komoditas ekspor, tetapi juga berkembang sebagai basis industri yang lebih kuat di dalam negeri. (FZN)

Menagih Kepatuhan Uni Eropa: Sawit Indonesia di Persimpangan Hukum Perdagangan Global

Pada 10 Januari 2024, *Panel Dispute Settlement Body* di WTO mengeluarkan laporan sengketa DS593 terhadap kebijakan Uni Eropa terkait *Renewable Energy Directive II* (RED II). Panel menyatakan bahwa sejumlah aspek kebijakan tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan kewajiban WTO, khususnya prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994 dan *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT). Dalam penilaiannya, panel mengidentifikasi bahwa penerapan kebijakan tersebut menghasilkan perlakuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip non-diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit dibandingkan bahan baku lain.

Putusan ini penting karena menyentuh persimpangan antara kebijakan transisi energi dan tata kelola perdagangan global. Untuk pertama kalinya, instrumen kebijakan hijau diuji secara sistematis dalam mekanisme sengketa multilateral akibat implikasinya terhadap komoditas negara berkembang. WTO menegaskan bahwa standar keberlanjutan adalah sah, namun tetap harus diterapkan secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif.

Namun efektivitas putusan tidak cukup diukur dari perubahan regulasi di atas kertas. Ia harus tercermin dalam indikator perdagangan yang terukur. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2025, volume ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa turun dari sekitar 4,9 juta ton menjadi sekitar 3,4 juta ton. Bahkan setelah putusan panel WTO pada Januari 2024, tren tersebut belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Volume ekspor yang tercatat sekitar 3,36 juta ton pada 2024 hanya meningkat tipis menjadi sekitar 3,40 juta ton pada 2025—masih jauh di bawah level sebelum pengetatan kebijakan.

Pada saat yang sama, pangsa Uni Eropa terhadap total ekspor sawit Indonesia juga menyusut dari 15 persen pada 2020 menjadi sekitar 10 persen pada 2025. Penurunan ini terjadi di tengah dinamika nilai ekspor global yang justru kembali meningkat pada 2025 hingga sekitar USD 37,7 miliar. Artinya, pemulihan pasar global tidak otomatis diikuti oleh pemulihan akses pasar di Eropa.

Secara teknis, kondisi ini menunjukkan bahwa koreksi normatif melalui putusan panel 2024 belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemulihan akses pasar yang nyata. Faktor harga dan kompetisi minyak nabati lain tentu berperan, namun korelasi antara pengetatan kebijakan dan penurunan pangsa pasar tetap menjadi indikator yang relevan untuk dievaluasi.

Menagih kepatuhan dalam konteks ini berarti memastikan bahwa penyesuaian kebijakan Uni Eropa menghasilkan dampak substantif. Kepatuhan perlu diukur melalui indikator perdagangan, proporsionalitas penerapan *due diligence*, serta kepastian perlakuan yang setara. Jika pangsa pasar tetap stagnan, maka wajar bagi Indonesia untuk meminta klarifikasi implementasi, bukan dalam kerangka konfrontasi, melainkan evaluasi berbasis data. Selain itu, penyesuaian terhadap RED II perlu dibaca secara terintegrasi dengan implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Kepatuhan tidak dapat dinilai secara parsial. Jika satu instrumen diperbaiki tetapi instrumen lain memperkenalkan beban dengan dampak serupa, maka substansi sengketa belum sepenuhnya terselesaikan. Sinkronisasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi tercermin dalam keseluruhan arsitektur regulasi.

Aspek krusial lainnya adalah transparansi metodologi dan klasifikasi risiko negara dalam EUDR. Indonesia memiliki dasar yang sah untuk meminta kejelasan parameter penilaian risiko, konsistensi penerapan antar komoditas, serta mekanisme koreksi berbasis data. Permintaan tersebut bukan bentuk resistensi terhadap standar lingkungan, melainkan bagian dari prinsip kepastian hukum dan praktik regulasi yang baik. Tanpa transparansi metodologis, sulit memastikan bahwa perlakuan yang diterapkan benar-benar proporsional dan objektif.

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar tentang sawit, melainkan tentang kredibilitas sistem perdagangan multilateral. Putusan WTO Januari 2024 telah memberikan preseden hukum yang penting. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa preseden tersebut hendaknya bertransformasi menjadi kepatuhan substantif yang berdampak nyata terhadap akses pasar.

Bagi Indonesia, menagih kepatuhan bukanlah memperpanjang sengketa, melainkan menjaga kepentingan nasional dalam kerangka aturan global yang adil. Kepatuhan yang terukur, regulasi yang transparan, dan perlakuan yang setara adalah prasyarat bagi stabilitas industri, kepastian usaha, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Di tengah transisi menuju ekonomi hijau global, konsistensi antara norma dan praktik menjadi fondasi utama. Tanpa itu, kemenangan hukum akan berhenti sebagai catatan, bukan sebagai jaminan kepastian ekonomi. (DHP)

Revisi Tata Kelola dan Penguatan ISPO dalam Menghadapi EUDR dan Tekanan Standar Global

Penguatan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 menandai reposisi strategis sistem sertifikasi nasional di tengah persiapan implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Di tengah meningkatnya tuntutan *due diligence*, geolokasi lahan, dan ketertelusuran rantai pasok, ISPO tidak lagi cukup diposisikan sebagai instrumen domestik, melainkan sebagai fondasi legitimasi global sawit Indonesia.

Secara normatif, Perpres memperluas kewajiban sertifikasi dari sektor perkebunan ke industri hilir dan bioenergi. Pendekatan *full supply chain* ini memperkuat posisi ISPO dalam menjawab tuntutan *traceability* yang menjadi inti EUDR. Integrasi sistem informasi berbagi data secara elektronik mempertegas upaya membangun sistem ketertelusuran nasional yang terdokumentasi dan terverifikasi.

Namun tantangan terbesar terletak pada kepatuhan sekaligus kemampuan pekebun kecil dalam memenuhi standar sertifikasi, serta konsistensi data dalam sistem ketertelusuran. Fragmentasi kepemilikan lahan, keterbatasan legalitas, serta kapasitas administrasi menjadi hambatan dalam memenuhi standar dokumentasi dan geolokasi yang dipersyaratkan pasar global. Masa transisi empat tahun bagi pekebun dan dukungan pembiayaan sertifikasi menjadi instrumen mitigasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada pendampingan dan penguatan kelembagaan di tingkat lapangan.

Dalam konteks harmonisasi standar nasional dan global, penguatan ISPO membangun kerangka *alignment* berbasis hukum nasional. Prinsip legalitas, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan ketertelusuran yang diatur dalam ISPO menjadi titik temu dengan standar global seperti RED II dan EUDR. Namun *alignment* tidak otomatis menghasilkan *equivalency*. Pengakuan internasional tetap memerlukan diplomasi teknis dan negosiasi dagang yang konsisten. Dari sisi tata kelola, reformasi kelembagaan melalui pembentukan Komite ISPO mempertegas koordinasi lintas kementerian dan memperluas partisipasi pemantau independen. Mekanisme sanksi administratif bagi pelaku usaha maupun lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa *mandatory* diperkuat dengan *enforcement*.

Reformasi ini menjawab pertanyaan apakah ISPO perlu penguatan kelembagaan jawabannya ya, dan proses tersebut telah dimulai melalui restrukturisasi *governance*.

Pada akhirnya, kredibilitas ISPO dalam menghadapi EUDR tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi oleh

integritas implementasi. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan harmonisasi kebijakan dan penyelesaian isu legalitas lahan. Lembaga sertifikasi dan Komite Akreditasi Nasional wajib menjaga independensi audit. Industri dan asosiasi pelaku usaha perlu membangun budaya kepatuhan berbasis sistem manajemen risiko. Pekebun kecil memerlukan pendampingan berkelanjutan. Akademisi dan pemantau independen berperan menjaga transparansi.

Tanpa konsolidasi seluruh pemangku kepentingan, upaya penyetaraan standar (*equivalency*) berisiko melemah. Akibatnya, potensi diskriminasi terhadap standar Indonesia dalam perdagangan global tetap terbuka. Karena itu, penguatan ISPO bukan hanya soal membenahi aturan. Ini adalah strategi tata kelola nasional untuk menjaga akses pasar, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dagang, dan memastikan sawit Indonesia tetap diakui dalam peta standar keberlanjutan global. (SN)



IPOSS  **NEWS**
INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer, Alya, Fikri**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id